

PERAN PEMERINTAH DAN NGO DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI CINA

Hikmatul Akbar¹

Abstract

As the fourth largest countries in the world, China suffered some natural disasters. Cost billion of Yuan and million of lives, disaster swept China in all form but volcanoes. Government managed so hard to cope with the situation, mean while NGO try to take a part on every action. Differ than any other countries in the world, China still run a socialist system with one political party on power. It is also mean that all of social life is managed by the government. NGO as a private actor has to hold its position backward, as to say it much different than NGO's role at the rest of the world. Government of China regards NGO as people's organization and it has to be directed, while NGO try all the way to maintain its autonomy and negotiate with the rulers.

Key Words: China, Disaster Management, Government, NGO

Pendahuluan

Banyak negara mengenal Cina sebagai negara yang sedang maju pesat dalam bidang ekonomi. Kekuatan ekonomi bahkan bisa menandingi Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi nomor satu di dunia. Tetapi pada sisi lain, banyak negara juga tidak menyadari bahwa Cina adalah negara yang sering ditimpa bencana alam. Boleh jadi ini juga disebabkan karena luasnya wilayah Cina. Sebagai negara dengan luas wilayah terbesar keempat di dunia, tentu banyak kesempatan terjadinya bencana alam yang mungkin menimpa berbagai penjuru wilayah negara Cina. Catatan mengenai gempa dan banjir di Cina bukanlah hal yang jarang ditemui. Kecuali gunung meletus, bencana lain juga kerap terjadi di Cina.

Dalam berbagai catatan juga ditemukan bahwa bencana alam di Cina menduduki posisi puncak dalam daftar bencana alam terbesar di dunia. Bencana banjir di Cina tahun 1931 menelan korban sekitar 2-4 juta jiwa. Banjir sungai kuning tahun 1887 menelan korban 900 ribu hingga 2

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta. Alamat email : kiki_sip@hotmail.com

juta jiwa. Sementara gempa bumi di Shaanxi tahun 1566 menelan korban hingga 830 ribu jiwa. Bencana banjir yang juga besar terjadi kembali di Sungai Kuning, tahun 1938 yang menelan korban 500-700 ribu jiwa (Floods in China, 2010). Gempa yang besar juga terjadi tahun 1976 di Tangshan yang menelan korban 242-779 ribu jiwa. Gempa besar sekali lagi terjadi di Provinsi Sichuan tanggal 12 Mei 2008 dengan kekuatan 8 skala richter yang menewaskan 69 ribu orang dan mengakibatkan 5 hingga 11 juta orang menjadi pengungsi. Gempa besar terakhir terjadi di daerah Yushu, Provinsi Qinghai tanggal 14 April 2010 dengan kekuatan 7 skala richter dan menewaskan sekitar 2.700 orang (CEA, 2010). Pada tahun 2010 sendiri masih terdapat bencana banjir yang menewaskan sekitar 1.500 orang.

Secara umum terdapat beberapa karakteristik pada bencana alam di Cina (Han Feng, 2010) :

1. Bencana alam tersebar pada wilayah yang luas dan terdiri dari berbagai jenis. Hampir 1/7 penduduk Cina terkena dampak bencana alam setiap tahun. Lebih dari 70% kota besar, 50% penduduk dan 75% GDP terletak pada daerah rawan bencana.
2. Bentuk dan jenisnya sangat beragam. Cina sudah mengalami berbagai macam bencana alam, dari yang ringan sampai yang sangat mengerikan. Bencana seperti angin topan, banjir, kekeringan, gempa bumi, kilat, badai, serangan meteor, bencana di pantai dan lain-lain. Bahkan bila memasukkan penyakit menular sebagai bencana, maka dampaknya akan menjadi jauh lebih besar.
3. Dibandingkan dengan negara lain, frekuensi bencana alam di Cina jauh lebih tinggi dan kerugiannya juga jauh lebih besar. Sepanjang tahun 1990 hingga 2008 rata-rata bencana alam per tahun di Cina menimpa 300 juta orang, menghancurkan lebih dari 3 juta bangunan, dan menyebabkan pengungsian lebih dari 9 juta orang. Kerugian ekonomi melebihi 200 miliar Yuan. Banyaknya frekuensi dan kerugian ini sebagian disebabkan oleh posisi geologis Cina (gempa bumi, banjir dan topan), dan sebagian lagi disebabkan karena banyaknya urbanisasi, yang menyebabkan penduduk terkonsentrasi di pusat-pusat kota, dan bangunanpun menjadi lebih rentan. Banyaknya urbanisasi dari desa ini menyebabkan keterbatasan listrik dan air, jalan dan sarana transportasi menjadi tidak berfungsi baik. Belakangan ini, kesadaran masyarakat atas kesiapan menghadapi bencana alam telah meningkat dengan adanya standar hidup yang lebih baik dan banyaknya media massa yang tersebar di seluruh pelosok Cina.

Pada sisi lain, masalah peran internasional selalu muncul sebagai hal yang penting di Cina. Selain peran Partai Komunis Cina (PKC) yang masih begitu kuat dalam berbagai institusi pemerintahan, masuknya kekuatan asing melalui jalur-jalur yang tidak dipahami oleh pemerintah Cina selalu menjadi ketakutan tersendiri. Demikian juga dalam menghadapi NGO yang dianggap dapat menjadi bentuk lain penyusupan asing. Sebaliknya, NGO yang berperan langsung dalam usaha penyelamatan jiwa manusia tentunya berusaha agar bisa memberikan bantuan yang sesuai kepada rakyat Cina, seperti yang sudah mereka lakukan di negara-negara lain yang terkena bencana alam. Tarik menarik antara peran pemerintah dan NGO di Cina ini kemudian menjadi hal yang sangat menarik untuk didiskusikan.

Pandangan Pemerintah Cina dan NGO.

Bagaimana Cina melihat peran internasional di dalam negeri dapat dirujuk pada ciri dari politik luar negeri Cina sendiri. Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya Cina mempunyai ciri khusus yang rupanya tidak bisa dijelaskan secara sederhana melalui teori-teori hubungan internasional yang sudah ada. Upaya yang dilakukan dengan pendekatan neo liberal memang membawa kejelasan bagi kondisi politik luar negeri Cina, tetapi setidaknya ada 3 hal yang perlu ditambahkan dalam penjelasan itu (Roy, 1998:4). Pertama, pengalaman sejarah Cina sangat mempengaruhi pengambil kebijakan dalam membuat keputusan, terutama dalam melihat lingkungan internasional. Bagaimana Beijing mendefinisikan kepentingannya dan bagaimana kepentingan itu sangat tergantung dari faktor-faktor khusus, yang bersandar pada pengetahuan dan pengalaman politik para elitnya. Kedua, keadaan politik dalam negeri Cina merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk kebijakan luar negeri. Pemimpin Cina sering mengambil kebijakan luar negeri yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, bukan untuk menaikkan posisi Cina dalam politik internasional. Ketiga, bahkan dalam sistem politik satu partai seperti di Cina, beberapa kelompok kecil yang terpisah memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan itu sendiri berjalan melalui proses perdebatan yang panjang dan banyaknya konsensus yang harus disepakati. Beberapa organisasi, faksi dan kelompok kecil di dalam partai sering berhasil membawa agendanya yang terkadang juga membawa kepentingan pribadi dan kelompok.

Pemerintah Cina percaya bahwa dunia pada saat ini sedang dalam perubahan besar. Arah politik sudah menjadi multi polar dan Globalisasi ekonomi juga membawa dampak yang tidak

alah penting. Keduanya sangat mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi dan kebudayaan dalam hidup manusia. Secara umum politik dunia menurun ketegangannya, menjadi lebih santai, dan kekuatan yang membawa perdamaian terus tumbuh. Tapi keadaan dunia sebenarnya masih jauh dari ketenangan, mental perang dingin masih tersisa. Politik kekuasaan dan hegemoni muncul dalam bentuk yang baru dan masih menjadi tugas yang sangat sulit untuk menentang hegemonisme dan kekuasaan penjaga perdamaian (Zhou, 2004:53). Cina tetap merasa bahwa setiap Negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, kaya atau miskin, adalah warga yang sederajat dari masyarakat internasional. Semua negara harus menyelesaikan pertentangan dan perselisihannya dengan cara damai melalui diplomasi dan tidak menyandarkan pada kekuatan atau ancaman militer. Tidak ada satu negara pun yang berhak untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dengan alasan apapun, apalagi sampai menggunakan kekuatan militer. Mereka juga tidak berhak untuk menghina, menjelek-jelekkkan atau bahkan menjatuhkan pemerintah negara lain. Cina tidak pernah memaksakan sistem sosial atau ideologinya pada negara lain, dan Cina juga tidak akan pernah membiarkan ada negara lain memaksakan sistem sosial atau ideologinya kepada Cina.

Sejak berakhirnya perang dingin, khususnya memasuki abad 21, masyarakat dunia sudah memasuki periode baru transisi peradaban. Bentuk teknologi digital, globalisasi ekonomi, pola strategis multi polar dalam politik dunia, demokratisasi dalam hubungan internasional, dan teknologi tinggi dalam peralatan perang telah menjadi tren sejarah yang mengubah secara cepat pola kehidupan masyarakat dunia dan juga keamanan internasional (Peng, 2004: 53). Globalisasi menyebabkan ketergantungan yang lebih besar antara satu negara dengan negara lain. Produksi dilakukan secara internasional, aliran modal melintas dari satu negara ke negara lain, pertukaran komoditas secara global telah menyebabkan infiltrasi timbal balik dan pencampuran kepentingan dari berbagai negara, yang artinya bila satu negara terkena dampak negatif, maka negara lain juga akan segera mendapat dampak yang sama, tetapi sebaliknya bila satu negara mendapat keuntungan, maka negara yang lain juga akan segera beruntung. Masyarakat internasional menjadi semakin dekat. Mereka juga membentuk masyarakat pertahanan dan berbagi kepentingan keamanan dan masalah keamanan. Peralatan perang yang sangat canggih pada masa ini kemudian menunjukkan bahwa ada hal yang berlawanan dalam tujuan perang dengan cara yang digunakan. Dengan sistem keamanan yang baru, suatu negara bisa diperlengkapi dengan peralatan perang yang sangat canggih untuk tujuan keamanan, tetapi sekaligus meningkatkan

rasa tidak aman bagi negara lain. Dunia ini butuh kedamaian, masyarakat butuh kerja sama, negara-negara butuh pembangunan dan manusia butuh kemajuan. Kesemuanya sekarang merupakan tujuan pembangunan, dan merupakan panggilan di masa kini. Masyarakat dunia yang telah melalui dua kali perang dunia dan masa perang dingin selama setengah abad, sangat membutuhkan perdamaian yang sejati, dan kehidupan yang aman dan stabil. Mereka juga membutuhkan adanya struktur keamanan internasional yang baik dan mapan, dan pembangunan dan kesejahteraan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia (Peng, 2004:54).

Perang juga bisa dilakukan dengan cara yang halus, seperti menyebar isu yang menjatuhkan kredibilitas pemerintah negara lain. Dalam pandangan elit politik Cina, isu HAM adalah strategi Amerika untuk menyebarkan pengaruhnya secara damai (Roy, 1998:154). Hal ini terlihat jelas dari adanya berbagai organisasi Amerika yang didukung pemerintah yang menyebarkan berita buruk tentang HAM di Cina. Bahkan beberapa lembaga pemerintah Amerika setiap tahun juga mengeluarkan pemberitaan resmi tentang pelanggaran HAM di Cina. Bagi Partai Komunis Cina (PKC), hal paling penting di dalam negeri adalah keberlangsungan kekuasaan PKC. Seperti yang pernah dikatakan Deng Xiaoping pada tahun 1992, jika Cina kalah dalam perang HAM ini, maka semua usaha Cina akan menjadi sia-sia. HAM adalah faktor utama dalam perjuangan antar kelas sosial di dunia. Tujuan utama dari Amerika Serikat dan negara barat lain dalam mengkritik Cina bukanlah untuk memperjuangkan HAM, tetapi untuk membaratkan dan memecah belah Cina. HAM adalah senjata awal bagi negara barat untuk bisa ikut campur dalam masalah internal negara lain dan secara khusus juga untuk melemahkan Cina. Cina dianggap penghalang utama Amerika Serikat dalam mendominasi dunia. Dengan bersandar pada pandangan ini, menjadi sangat jelas mengapa Cina bereaksi begitu keras dan bermusuhan terhadap tekanan internasional dalam isu HAM. Hal yang kembali muncul ketika membicarakan korban bencana alam di Cina.

Selain masalah HAM dan korban bencana alam, kehadiran NGO adalah isu yang cukup mengganggu pemerintah Cina. NGO asing bisa masuk ke Cina dan langsung menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat Cina pada saat ini perlahan-lahan dipaksa untuk menghadapi kekuatan kapitalisme secara mandiri. Negara (dan PKC) semakin mengurangi perannya dalam ekonomi (Wibowo, 2000: 220). Situasi ini sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah seperti terjadi di negara-negara kapitalis di Barat di mana hukum dilaksanakan secara konsisten. Yang menjadi

persoalan di Cina adalah masyarakat bawah sulit mendapatkan keadilan ketika mereka mengalami perlakuan tidak adil. Hukum dibengkokkan untuk kepentingan para elit politik dan kelompok kapitalis baru. Korupsi dipengadilan Cina memang sudah menjadi rahasia umum. Karena masyarakat bawah tidak mempunyai cukup dana untuk menyuap para penegak hukum, mereka dengan mudah dikalahkan para kapitalis baru.

Untuk menghadapi situasi ini, ada cara lain, yaitu mendirikan organisasi. Tetapi celaknya pemerintah Cina melarang masyarakat mendirikan organisasi di luar organisasi resmi yang sudah disahkan oleh pemerintah. Satu organisasi di setiap sektor adalah aturan yang jelas dari pemerintah Cina. Cukup banyak rakyat Cina yang berkeras mendirikan organisasi gelap. Tetapi bila tidak dapat izin dan perlindungan yang jelas, mereka akan ditangkap oleh polisi atau aparat negara lainnya. Para aktivis pembela rakyat juga akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara.

Dengan demikian, sekalipun penduduk kota di Cina telah mengalami peningkatan kualitas kehidupan, hal itu belum diiringi oleh peningkatan hak-hak sipil, termasuk hak ekonomi dan hak politik mereka. Negara menghilangkan hak masyarakat untuk mendirikan organisasi yang independen dari negara. Mereka semua digiring masuk ke organisasi sejenis yang didirikan dan dikontrol oleh negara.

Dalam struktur politik Cina saat ini, organisasi masyarakat adalah pengikat antara PKC dan masyarakat, dan menjadi bagian penting dari struktur pemerintahan Cina (Yin, 2004: 156). Tetapi meskipun Cina sudah mengalami reformasi tetap saja NGO versi barat tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah Cina. PKC tetap menyediakan arahan untuk berbagai aktifitas politik formal. Organisasi masyarakat seperti Federasi Serikat Pedagang Seluruh Cina dan Federasi Perempuan seluruh Cina, selalu diarahkan dan dipimpin oleh pejabat PKC dan tetap meneruskan kebijakan ke bawah, bukan memberikan perhatian pada tuntutan masyarakat bawah untuk diteruskan ke atas. Pada sisi lain, NGO baru yang berkembang pada tahun 1980an justru memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat. Termasuk Asosiasi Keluarga Berencana Cina, Sahabat Alam, Asosiasi Pengusaha Swasta, dan Federasi Dagang dan Industri (Wu, 2003: 37). Dan seperti biasa, hanya ada satu macam organisasi yang diakui pemerintah untuk setiap sektor, yang memperlihatkan adanya kontrol pemerintah yang terus berjalan. Dalam pandangan PKC, pengaturan kerjasama ini akan mengurangi ancaman akan adanya hubungan yang besar lintas sektoral. Status yang terbatas bagi NGO itu terlihat dari adanya istilah dari pemerintah

Cina yaitu Government Organized Non Governmental Organization atau GONGO (Hague dan Harrop, 2007: 226). Tidak adanya jaringan yang besar dan kuat antara organisasi mandiri dan kelompok kepentingan justru menghalangi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam membuat kebijakan yang efektif dan juga menerapkannya. Hambatan yang sangat besar dalam hal ini adalah ketakutan itu sendiri. (Hague dan Harrop, 2007: 392).

Sebagai organisasi swasta dan bersifat non pemerintah, tentunya NGO tidak mendapat dukungan seperti IGO, demikian juga pengaruhnya terhadap politik domestik suatu negara. Pandangan ini mungkin bisa dibenarkan, terutama bila berhadapan dengan negara besar. Tetapi dampak kehadiran NGO di negara-negara berkembang terasa cukup signifikan. NGO yang besar seperti Red Cross dan Medecins Sans Frontier bisa memberikan tekanan yang cukup besar kepada pemerintah tempat terjadi krisis kemanusiaan atau perang saudara.

Pada kasus tertentu, NGO bisa menjadi aktor penting bagi keputusan-keputusan PBB. Pada pertengahan 1990-an lebih dari 10% dari bantuan kepada negara-negara disalurkan melalui NGO. Padahal pada tahun 1970-an angkanya hanya mencapai kurang dari 1% (Hague dan Harrop, 2007: 40). Sekitar sepuluh NGO yang sangat kuat, termasuk CARE, Save the Children dan Oxfam, mendominasi penyaluran bantuan dalam berbagai keadaan darurat.

Karena terkadang berperan sebagai agen bawahan PBB, NGO bisa juga menggantikan fungsi pemerintah. Sebagai contoh, NGO berhasil mendirikan sekolah dasar untuk warga Sri Lanka, setelah kejadian perang saudara pada tahun 1987 (CENWOR, 2001). Sebagai saluran untuk membagikan bantuan dan menerapkan kebijakan yang serupa dengan kebijakan pemerintah, NGO tentu mempunyai daya tarik yang besar bagi para donor. NGO bekerja secara lebih efisien dan jauh dari korupsi dibandingkan dengan pemerintah lokal. Mereka juga lebih sensitif terhadap keadaan politik, dibandingkan dengan pemerintah atau militer setempat yang biasanya sering juga ikut turun tangan.

Faktor ini menunjukkan peran yang besar dari NGO pada negara yang menjadi pusat bantuan internasional. Ini juga yang menyebabkan NGO menjadi tantangan terbesar dari pemerintah dalam hal kedaulatan wilayah, keamanan, otonomi dan pendapatan negara. Tidak hanya NGO bisa mengganggu kestabilan pemerintah yang berkuasa, tetapi NGO juga menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri, dimana mereka bisa menawarkan pekerjaan yang lebih mapan bagi penduduk lokal, dan juga menyediakan sarana permintaan bagi peningkatan ekonomi. Jika

state-building adalah masalah yang besar, maka posisi NGO menjadi seperti pasukan yang melakukan invasi. Untuk itu pula NGO harus memiliki *exit strategy*. (Hague dan Harrop, 2007 : 41)

Pemerintah sebagai Aktor Utama Penanggulangan Bencana Alam

Peralihan Cina dari negara yang sepenuhnya menganut sosialisme menjadi negara yang cenderung kapitalis (yang disebut oleh pemerintah Cina sebagai Sosialisme Pasar) sudah berjalan selama 30 tahun. Dalam bidang ekonomi keberhasilan sudah terlihat. Keikutsertaan dalam WTO dan perang yang lebih besar di PBB sudah menjadi bukti peningkatan partisipasi Cina dalam politik internasional. Tetapi harus diingat bahwa meskipun pemerintah Cina sudah menjalankan sistem ekonomi pasar, tetapi dalam banyak hal peran pemerintah tidak bisa dikesampingkan. Pemerintah selalu ikut mengarahkan harus dibawa kemana perekonomian Cina dan pilihan pengembangan ekonomi itu sendiri. Dalam hal ini selalu ada lembaga di bawah pemerintah yang terjun langsung dalam fungsi pengawasan dan pengarahan kegiatan ekonomi itu sendiri.

Hal yang sama juga terjadi dalam bidang penanggulangan bencana. Peran swasta (dalam hal ini NGO) tentu mendapat tempat di pemerintah Cina, sejalan dengan prinsip keterbukaan tetapi semuanya harus di koordinasikan dengan lembaga pemerintah. Pemerintah Cina telah memiliki badan khusus untuk mengatasi masalah bencana alam yaitu The National Disaster Reduction Center (NDRC). Badan ini bekerja di bawah kementerian urusan sipil. Badan ini merupakan badan khusus dibawah pemerintah Cina yang mengatur masalah informasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan berbagai jenis bencana alam. NDRC juga menjadi rujukan bagi kantor-kantor penanggulangan bencana dalam pengambilan keputusan dan bantuan teknis untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi bencana, melihat besarnya bencana dan kemudian memberikan bantuan. NDRC juga memberikan informasi yang lebih valid dengan menggunakan satelit penginderaan jarak jauh.(NDRC, 2010)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengatur penanggulangan bencana alam di Cina. Hal-hal ini sebenarnya menunjukkan perbedaan yang besar dengan sistem penanggulangan bencana di negara-negara maju. Hal-hal itu dapat disebutkan sebagai berikut: (Asian Disaster Reduction Center, 2010).

1. Pekerjaan pada lembaga penanggulangan bencana di Cina cenderung bersifat primitif, terbelakang, tidak konsisten antara teori dan penerapan teknologi. Manajemen antara berbagai tingkat pemerintah sangat tidak seimbang.
2. Kampanye dan pendidikan tentang tanggap darurat bencana sangat tidak cukup.
3. Tingkat pengetahuan teori dan praktek pada berbagai kelas sangat berbeda.
4. Sistem manajemen bencana pada berbagai daerah sangat berbeda. Pengetahuan tentang bencana pada daerah yang maju cenderung lebih baik dari pada daerah yang belum maju.
5. Tidak ada hukum yang cukup baik untuk mengatur penanggulangan bencana di seluruh negeri.

Kekurangan pemerintah itu kemudian menyebabkan korban yang tinggi ketika terjadi bencana alam. Sebagai contoh dalam menghadapi bencana banjir tahun 2010, penduduk Cina sangat tidak siap sehingga terjadi korban yang cukup banyak. Jumlah korban hilang dan tewas pada bencana tanah longsor dan banjir di Cina hingga bulan Oktober tahun 2010 naik menjadi lebih dari 4.300 orang. Deputi direktur dari NDRC, Du Ying, menyatakan bahwa bencana banjir dan tanah longsor telah menyebabkan 3.313 orang tewas. Ini termasuk sekitar 1.500 orang tewas pada bencana tanah longsor di provinsi Gansu, daerah barat laut Cina, pada bulan Agustus 2010. Menurut Du, bencana alam juga mengakibatkan korban orang hilang sebanyak 1.029 orang, dan jumlah orang yang harus diungsikan sebanyak 15,7 juta orang. Kerugian ekonomi mencapai 370 milyar Yuan atau sekitar 55 juta dolar. (AFP, 2010)

Setelah banyaknya bencana alam sepanjang tahun 2010, pada bulan Desember, Pemerintah Cina mengumumkan hasil pekerjaan dalam memperhatikan masyarakat. Pemerintah berhasil mengumpulkan sumbangan dana untuk bencana alam hingga 7 miliar Yuan atau sekitar 1 milyar dolar AS. (Xinhua, 2010a). Dana ini ditujukan pada korban gempa bagian barat daya Cina yang telah terjadi sejak tahun 2008. Pernyataan mengenai hasil pengumpulan dana ini pertama kali disampaikan oleh Pusat Manajemen dan Distribusi sumbangan kemakmuran Cina, hanya beberapa minggu sebelum akhir waktu proyek pengumpulan dana. Proyek ini sendiri dimulai beberapa saat setelah gempa dengan kekuatan 8,0 skala richter menguncang bagian barat daya Cina pada bulan Mei 2008. Korbannya sebesar 87.000 orang dinyatakan hilang dan tewas.

Pengumpulan sumbangan ini direncanakan dilakukan selama 30 bulan dan dimulai tanggal 1 Juli 2008, dan berlangsung hingga akhir Desember 2010. Ini adalah proyek

pengumpulan dana terbesar yang ditujukan untuk pemulihan korban bencana alam. Pengumpulan dana yang cukup besar sebelumnya adalah proyek yang dilakukan menyusul terjadinya banjir sungai Yangtze pada tahun 1998, waktu itu terkumpul dana sebesar 1,5 milyar Yuan (National Bureau of Statistic of China, 1998). Pengumpulan dana untuk kesejahteraan ini sendiri dimulai pada tahun 1987.

Dalam menangani rakyatnya yang terkena bencana alam, sebenarnya pemerintah Cina juga bisa bereaksi dengan cepat. Misalnya dalam kasus gempa di Sichuan, Perdana Menteri Wen Jiabao langsung mengunjungi Sichuan dengan pesawat hanya dalam waktu 90 menit setelah bencana gempa terjadi. Presiden Hu Jintao juga segera mengumumkan bahwa akan ada bantuan dan pertolongan dalam waktu yang sangat cepat. Dalam bencana itu sendiri Pemerintah Cina menghabiskan sekitar 441 Milyar dolar AS untuk penyelamatan dan pembangunan kembali wilayah Sichuan (Chinagate, 2008). Tidak ketinggalan dalam misi penyelamatan korban juga dikerahkan 55 ribu personil militer dan polisi untuk bekerja sebagai tim SAR. Para ahli gempa, petinggi militer yang bisa mengerahkan tentara, dan para dokter ahli dikirimkan dari Beijing ke Wenchuan (daerah pusat gempa) langsung pada hari itu juga. Kantor penanggulangan bencana Cina segera mengumumkan tentang status waspada tingkat 1 untuk daerah bencana.

Untuk pengungsi pun banyak bantuan yang diberikan. Pemerintah provinsi dan markas militer daerah juga turun tangan. Sarana helikopter juga digunakan, termasuk 90 helikopter yang langsung dikirim dari Beijing. Kesulitan transportasi menjadi hambatan yang utama karena banyak jalan yang rusak dan juga tertimpa longsor. Pemerintah juga pada tahap selanjutnya menerjunkan hingga 135 ribu orang tentara dan tenaga medis dalam mengatasi bencana ini (Hoyer, 2008). Berbagai bantuan internasional datang, dan semuanya dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah Cina. Masyarakat internasional sendiri memberikan pujian terhadap pemerintah Cina karena cepatnya tindakan dan besarnya perhatian pada bencana ini.

Provinsi Sichuan sendiri sebenarnya cukup penting bagi pemerintah Cina. Secara geografis, provinsi ini terletak di dataran tinggi. Wilayah bagian barat Sichuan merupakan daerah plateau dan bergunung-gunung sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Bagian timur provinsi ini membentang lembah dan bukit dengan elevasi 1.000-3.000 meter. Lembah Sichuan seluas 165.000 km² merupakan salah satu lembah terbesar di Cina. Sichuan memiliki sumber daya tenaga air terbesar kedua setelah Tibet. Di Provinsi ini terdapat habitat binatang Panda raksasa yang tersebar di 36 daerah dan konservasi alam di empat pegunungan. Bandara Chengdu

Shuanliu merupakan salah satu bandara yang paling sibuk. Selain Chengdu terdapat bandara di Dachuan, Yibin, Luzhou, Xichuang, dan Nanchong. Sichuan menjadi penghasil gas alam terbesar di China. Tahun 2004 produksinya 11,7 miliar m³ yang merupakan 28% dari total produksi nasional. (Darmawan, 2006:100). Dilihat dari sisi politik dan kesejarahan, Sichuan adalah tempat kelahiran dari Mantan Presiden Cina, Yang Shangkun dan Mantan Perdana Menteri Cina, Li Peng.

Konsistensi pemerintah Cina terhadap bantuan bencana alam tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Cina juga merasa mempunyai kewajiban dalam program bantuan kemanusiaan di dunia, hal ini tidak tergantung dari GNP Cina sendiri. Asisten Menteri perdagangan Chen Jian membuat pernyataan ketika ada konferensi Pers di Kantor informasi Dewan Nasional. Chen Jian menyatakan bahwa Cina masih merupakan negara berkembang dan pendapatan perkapita GDP nya belum akan meningkat dengan cepat dalam waktu dekat.

Cina masih memiliki puluhan juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan, apalagi tingkat kesenjangan antara kota dan desa juga masih sangat tinggi. Kesenjangan juga terjadi antara berbagai wilayah di Cina. Chen Jian juga menyatakan bahwa hidup berteman dan berbaik hati kepada orang lain adalah bagian dari ajaran Cina tradisional. “Karenanya kami lebih dari ingin untuk ikut menyediakan bantuan sebanyak yang kita mampu, ketika negara lain berada dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan.” (Xinhua, 2010b)

Bencana alam adalah musuh bersama bagi masyarakat internasional dan setiap Negara harus merasa wajib untuk ikut serta mengatasi bencana alam ini dan melindungi rumah bagi umat manusia secara keseluruhan. Pada awal tahun 2005 pemerintah Cina sudah terlibat dalam berbagai operasi penanggulangan bencana alam yang besar, seperti Tsunami dan Gempa Bumi yang melanda kawasan samudera India dan negara sekitarnya. Kemudian juga bencana angin topan di Amerika Serikat dan juga gempa di Pakistan. Cina juga terlibat dalam penanggulangan bencana flu burung di Vietnam dan Korea Utara. Selain juga menawarkan bantuan dana segar untuk bencana banjir di Rumania, gempa di Iran, wabah kolera di Guinea-Bissau, wabah demam berdarah di Ekuador dan angin topan di Uruguay. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, Cina akan punya posisi yang lebih baik dalam ikut serta penanggulangan bencana alam di seluruh dunia (Thompson, 2008).

Peran NGO dan Hambatan dari Pemerintah Cina

Secara umum, NGO di Cina tidaklah sama dengan NGO di negara lain. Di negara Cina yang menganut sistem satu partai, NGO mempunyai ruang politik yang sangat terbatas untuk beroperasi. Pemerintah masih menjadi aktor utama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini dilakukan bahkan untuk kegiatan yang di seluruh dunia dilakukan oleh NGO. Dengan bekerja secara paralel seperti ini, organisasi masyarakat di Cina, bersama dengan NGO yang dijalankan oleh pemerintah (GONGO), bekerja dengan sistem hirarki, sama dengan sistem pemerintah di Cina. Di Cina terdapat sekitar 2 juta organisasi masyarakat, termasuk NGO asing, perkumpulan pedagang dan ilmuwan, kelompok-kelompok amal, organisasi petani dan organisasi kesehatan. Lingkungan kerja bagi NGO di Cina masih dipengaruhi rasa saling tidak percaya. NGO di Cina lebih berupa kelompok sosial daripada kelompok politik jika melihat tingkat kemandirian terhadap pemerintah dan tujuan yang sama dengan organisasi pemerintah. (Kaufman, 2010)

Pada sisi yang lain, NGO di Cina kerap kali memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Terutama setelah ditemukannya penyelewengan anggaran oleh berbagai aparat pemerintah dalam perbaikan dampak bencana. Berbagai sekolah dasar dilaporkan memiliki gedung yang tidak sesuai dengan standar bangunan. Demikian pula penyelewengan berbagai dana yang lain. Mengingat pemerintah Cina selalu memberikan hukuman yang berat kepada para koruptor, hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Cina.

Melihat kejadian gempa Sichuan sendiri, pemerintah Cina sudah menyediakan berbagai jalan bagi NGO untuk ikut serta dalam penanggulangan dan kemudian pemulihan bencana itu. Sehingga meskipun tidak dilaporkan secara rinci, tetapi NGO bisa mengambil peran yang cukup besar, terutama dalam menyalurkan bantuan dana dari luar negeri. Pada sisi yang lain, peran NGO kemudian dipertanyakan oleh pemerintah Cina dalam bencana gempa di Qinghai (Gochengdoo, 2010).

NGO sendiri beralasan bahwa mereka memang ada bukan untuk menggantikan peran pemerintah tetapi untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah. Lebih jauh, NGO di Cina sendiri sudah memiliki banyak keterbatasan, karena sejak mereka datang ke Cina mereka harus melalui banyak hambatan. Pendaftaran di kantor urusan sipil untuk dapat diakui sebagai

salah satu organisasi yang resmi dan boleh beroperasi di Cina adalah hal yang sulit, mengingat banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi yang diminta oleh pihak birokrasi Cina.

Dalam kasus gempa Qinghai sendiri, NGO beralasan bahwa mereka terhambat oleh banyaknya rintangan alam, berbeda dengan gempa Sichuan dimana letaknya cenderung di dalam kota dan berbagai NGO sendiri sudah lebih dulu berkantor di daerah tersebut. Dalam kasus Qinghai sendiri, masyarakat mungkin saja tidak berinteraksi langsung dengan NGO, tetapi berbagai sumbangan yang diberikan (dan disalurkan) oleh NGO telah membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Hambatan alam di Qinghai lebih memungkinkan peran pemerintah mengingat sarana transportasi dan berbagai peralatan besar yang telah mereka miliki. NGO tentu bisa menyewa kendaraan berat dan helikopter, tetapi kembali, perizinan akan sangat sulit, kecuali bila NGO tersebut sudah memiliki izin sebelumnya.

Dengan cara yang sama, NGO sendiri bisa melihat pemerintah yang sangat kecil dalam bencana kekeringan di Cina. Anggaran pemerintah Cina meningkat tajam untuk urusan mengatasi bencana, namun tiap sekolah masih sering diminta sumbangan untuk memberikan dana. Bahkan ada catatan mengenai kewajiban tiap siswa untuk memberikan sumbangan sebesar 2 yuan dalam pengumpulan dana untuk bencana kekeringan.

Kebanyakan NGO di Cina adalah organisasi yang berakar langsung pada masyarakat Cina di kelas bawah kurang mendapat dukunga dari pemerintah. Ketika masuk ke Cina mereka harus mendaftar, dan celakanya mereka tidak boleh mendaftar di kantor urusan sipil. Setelah berjuang selama beberapa tahun, baru mereka bisa terdaftar secara resmi, itupun masuk di kantor urusan perdagangan dan industri. Dengan terdaftar di kantor ini berarti mereka harus membayar pajak. Setelah beberapa tahun menjalankan program kemanusiaan, sembari tetap membayar pajak, barulah kantor urusan sipil bersama dengan kantor perdagangan dan industri itu memeriksa mereka. Kesulitan pendaftaran memang menyebabkan NGO menggunakan nama yang berbeda untuk urusan pendaftaran dan urusan kegiatan, dan banyak NGO yang kemudian dituduh menggelapkan kegiatan dan karenanya harus ditutup (Yu, 2010). Beberapa NGO yang lolos dalam proses ini harus berurusan dengan aturan baru tentang organisasi asing yang cukup menyulitkan. Sebagai contoh sekolah pekerja migran yang didirikan oleh NGO di Beijing harus ditutup, ini terkait dengan diadakannya pertemuan pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan nasional. Panti asuhan Sessen di Chongqing juga kemudian ditutup terkait hal yang sama. Bahkan kegiatan amal di Shanghai World Expo kemudian juga dilarang (Expo, 2010).

Beberapa kelompok sudah berusaha untuk menolak pembatasan NGO, seperti pada kasus demonstrasi anti pajak untuk NGO. Sekitar 24 NGO bersama masyarakat berdemonstrasi karena mereka juga sudah bekerja keras untuk masyarakat, jadi tidak perlu dikenakan pajak lagi. Ini akan menjadi perjuangan yang panjang bagi NGO, karena pemerintah Cina tidak dengan mudah menerima kehadiran mereka. Oxfam, salah satu NGO terbesar di dunia sebagai contoh, dianggap sebagai musuh masyarakat oleh Kementerian Pendidikan. Semua Universitas di Cina diingatkan untuk tidak bekerja sama dengan Oxfam. Oxfam yang selalu berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan pemerintah Cina merasa seperti ditinggalkan begitu saja setelah selama 20 tahun ikut bekerja membantu masyarakat Cina. Ketika terjadi bencana kekeringan di Cina, Oxfam adalah salah satu NGO yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi bencana itu, tetapi karena hubungan yang tidak baik dengan pemerintah Cina, mereka kemudian tidak berpartisipasi (Oxfam Hongkong, 2010). Tentunya kita tidak bisa menyalahkan NGO yang tidak berpartisipasi dalam bencana kekeringan di Cina, karena mereka mendapat banyak halangan untuk berpartisipasi dari pemerintah. NGO kemudian tidak mempunyai dana untuk disumbangkan, tidak mempunyai kapasitas institusional untuk merespon krisis, dan harus berhadapan dengan berbagai hambatan internal dan eksternal. Bagi NGO, tidak benar bahwa mereka tidak peduli pada bencana kekeringan, hal ini lebih dikarenakan langkah mereka dihalangi oleh pemerintah Cina (Yu, 2010).

Sepanjang tahun 2010 terdapat banyak kejadian menarik terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Di negara Cina, istilah yang digunakan adalah 'gongyi'. Istilah ini sebenarnya menunjuk pada lembaga dan kegiatan nir laba, masyarakat sipil dan kegiatan amal (CANGO, 2011). Beberapa contoh penting dapat disebutkan seperti di bawah ini:

- Bulan Januari 2010, pemerintah provinsi Yunnan memberlakukan peraturan baru untuk manajemen NGO internasional. Peraturan ini adalah yang pertama yang ditujukan secara khusus bagi internasional NGO.
- Pada bulan Februari, kementerian pendidikan mengeluarkan pengumuman agar semua universitas di Cina menghentikan kerjasama dengan Oxfam Hongkong dan NGO internasional lain yang merekrut tenaga relawan dari mahasiswa untuk proyek mereka.
- Maret 2010, NGO CN (Jaringan pengembangan dan pertukaran informasi NGO), sebuah NGO yang berkantor di Kunming yang menyediakan jasa informasi dan pusat pelatihan bagi NGO di tingkat paling bawah, ditutup oleh pemerintah. Ini ditujukan agar semua

NGO di sana ikut ambil bagian dalam mengatasi bencana kekeringan di barat daya Cina. Tahun 2011, NGOCN muncul kembali sebagai NGOCN.info .

- Bulan Maret 2010 itu juga, peraturan baru dari kantor Administrasi Negara untuk Urusan Luar Negeri mulai diberlakukan. Peraturan ini mengakibatkan kesulitan yang lebih tinggi bagi NGO tingkat bawah untuk mendapatkan dana dari luar negeri. Transfer dana dari luar kepada masyarakat Cina harus memenuhi banyak persyaratan yang sulit.
- Masih pada bulan Maret 2010, keterlambatan NGO dalam merespon bencana kekeringan di bagian barat daya Cina menimbulkan kritik yang luas. Khususnya bila dikaitkan dengan cepatnya respon NGO dalam menangani korban gempa di Wenchuan pada tahun 2008.
- Pada bulan April and Juli 2010, Aliansi Pilihan Hijau, sebuah kelompok yang terdiri dari 34 NGO masyarakat bawah termasuk Sahabat Alam, Institut urusan Masyarakat dan Lingkungan, dan NGO *Green Beagle*, mengeluarkan dua laporan hasil penelitian tentang polusi logam berat dari industri teknologi dan informasi Cina.
- Pada bulan Mei 2010, Cao Dewang, Pimpinan kelompok Fuyao, memberikan sumbangan terbesar dalam sejarah RRC, 200 juta Yuan, kepada Yayasan Cina untuk pemberantasan kemiskinan, Sumbangan ini ditujukan untuk membantu petani miskin di 5 provinsi yang terkena bencana kekeringan di barat Daya Cina.
- Pada bulan Mei, Institut Aizhixiang Beijing, NGO pertama yang bergerak dalam bidang HIV/AIDS di Cina diperiksa dan ditekan oleh beberapa kantor pemerintah, sehingga mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana. Pemeriksaan dan penekanan itu berlangsung sejak tanggal 14 Januari 2010. Karena tidak kuat mendapat tekanan dan ancaman akhirnya pada bulan Mei, pendirinya yaitu Wan Yanhai pergi meninggalkan Cina bersama keluarganya menuju Amerika Serikat.
- Bulan Juni 2010, Institut Riset untuk Kesejahteraan Masyarakat diresmikan di Universitas Beijing. Institut ini didanai oleh Yayasan One dan dipimpin oleh mantan Menteri Urusan Sipil, Wang Zhenyao.
- Pada bulan Juli 2010, 15 yayasan pemerintah dan 20 yayasan swasta di Cina mendirikan Pusat Yayasan Cina. (China Foundation Center)
- Bulan Juli 2010 itu juga, Kementerian Urusan Sipil meminta 15 yayasan pengumpulan dana amal nasional untuk memberikan dana yang telah dikumpulkan untuk perbaikan

korban gempa Yushu di Provinsi Qinghai. Dana yang sudah dikumpulkan itu harus disalurkan melalui pemerintah Provinsi Qinghai, Palang Merah Provinsi, atau Federasi Amal Provinsi. Keputusan ini sangat dikritik karena bisa menghancurkan sistem pemberian sumbangan sosial di Cina.

- Pada bulan September 2010, Jet Li, aktor laga terkenal Cina dan juga pemilik Yayasan One, menyatakan bahwa ketika pertama kali mendaftarkan yayasannya sebagai yayasan milik swasta, ia mengalami banyak kesulitan. Bahkan beberapa waktu kemudian setelah kegiatan yayasan itu berjalan, muncul rumor bahwa yayasan itu akan segera ditutup.
- Bulan September 2010 itu juga, Bill Gates dan Warren Buffet, 2 orang terkaya di dunia mendiskusikan dana amal dengan beberapa orang paling kaya di Cina.
- Bulan Oktober 2010, hampir 60 NGO Cina ikut serta dalam konferensi Perubahan Iklim di Tianjin. NGO ini mengeluarkan pernyataan bersama, dan merencanakan 20 kegiatan bersama. Konferensi ini adalah konferensi terbesar dalam bidang iklim yang dihadiri NGO di Cina.
- Pada bulan November, peringatan hari AIDS sedunia, organisasi AIDS Ai Yuan “Pusat Konsultasi dan Sumber Informasi Cinta Beijing” menyatakan bahwa NGO itu harus menutup pintunya karena adanya pemeriksaan pajak oleh kantor pajak Beijing.
- Bulan Desember, sejumlah aktifis yang diundang ke Oslo dalam rangka pemberian hadiah Nobel perdamaian bagi Liu Xiaobo, tidak diizinkan untuk meninggalkan Cina.
- Masih pada bulan Desember, sampai dengan akhir tahun, undang-undang kegiatan dan dana amal yang diharapkan bisa selesai akhir tahun harus ditunda karena masih diperiksa oleh Kongres Rakyat Nasional (Parlemen) Cina. Revisi pada bagian aturan pendaftaran dan manajemen juga harus ditunda, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya Pada awal 2011, yayasan One milik Jet Li menjadi yayasan swasta pertama yang didaftarkan secara legal untuk bisa melakukan pengumpulan dana di Shenzhen. Ini adalah salah satu tanda bahwa pemerintah melonggarkan kontrolnya untuk kegiatan amal.

Alternatif Penyelesaian: Dilema GONGO

Tarik menarik antara pemerintah dan NGO ini sendiri tidak dapat dikatakan hanya merupakan kesalahan pemerintah. Pemerintah sudah berusaha mencari jalan tengah dengan adanya GONGO. Di Cina sendiri sebenarnya ada banyak jenis GONGO, beberapa diantaranya

bahkan tidak melakukan apa-apa selain mengumpulkan uang dari masyarakat dan dunia internasional. Tetapi tentu saja banyak juga yang benar-benar mengumpulkan dana untuk disalurkan dengan pekerjaan yang benar-benar berkualitas. GONGO juga tidak bisa selalu dianggap lebih baik dari NGO yang berusaha untuk mandiri dan bekerja tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah. Beberapa bahkan bekerja lebih baik tanpa adanya kontrol itu.

Cina sebenarnya sudah menandatangani Konvenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil warga negara, tetapi kovenan itu tidak pernah diratifikas oleh pemerintah Cina. Karenanya pemerintah punya hak untuk membatasi kebebasan berkumpul, sejauh pembatasan itu dibutuhkan dalam masyarakat demokratis dan berada dalam koridor kepentingan keamanan nasional, keselamatan warga, keteraturan masyarakat, untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan juga moralnya, dan juga melindungi hak dan kebebasan orang lain. Semua pembatasan harus diterjemahkan dalam lingkup yang paling kecil dan proporsional sesuai dengan alasan yang ada. Pemerintah tidak boleh menggunakan cara-cara pembatasan melebihi yang dibutuhkan. Sementara dipihak lain, tentunya negara mempunyai hak untuk memastikan bahwa NGO harus bersifat jujur, dan transparan, persyaratan hukum harus dibuat seminimal mungkin. Selain itu persyaratan harus bersifat jelas dan bisa diterapkan, dan bisa memberikan fleksibilitas yang cukup luas bagi NGO untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Persyaratan itu juga harus diterapkan tanpa diskriminasi.

Dengan kata lain, negara memang mempunyai hak untuk membatasi pendaftaran dan pendirian NGO, ini jug dilakukan oleh semua negara di dunia. Kasus peraturan yang diterapkan di provinsi Yunnan sangat terlihat bahwa aturan itu tidak sederhana, tidak jelas, dan dalam banyak kasus tidak akan bisa dijalankan (Davis, 2010). Aturannya bukan hanya berurusan dengan mengisi formulir, menyertakan data yang dibutuhkan dan mengirimkannya. Aturan itu menuntut agar NGO bisa mendapatkan persetujuan untuk pekerjaannya dari berbagai kantor pemerintah yang terkadang tidak jelas juga kantor mana yang dimaksud. Dokumen yang dibutuhkan juga sangat tergantung dari setiap kantor yang dituju.

Terlebih lagi, karena tidak jelasnya aturan itu dituliskan, penerapannya bisa sangat luas dan bisa diselewengkan. Pada kenyataannya, untuk bisa mendaftarkan diri di Biro Urusan Sipil, NGO asing harus mencari seorang ‘ibu tiri’ (seperti persyaratan adanya GONGO) (China Development Brief, 2010). ‘Ibu tiri’ ini pada kenyataannya adalah pejabat senior di kantor pemerintah yang bisa melonggarkan aturan, bisa menelpon pejabat lain yang diperlukan, dan bisa

mengajak makan siang untuk melicinkan jalur pendaftaran. Pejabat itu kemudian yang menjadi jaminan dari semua yang dilakukan oleh NGO asing, atau akan meluruskan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan NGO. Bila ada pejabat tinggi pemerintah merasa terganggu dengan kegiatan NGO asing itu, maka 'ibu tiri' inilah yang akan mendapat telpon pertama kali dan akan mendapat hukuman dari atasannya.

Tentu saja pada tingkat tertentu hal ini sudah sering terjadi untuk NGO asing yang sudah membuka kantor di Cina, tetapi hampir semuanya mengatakan ini 'off the record'. Tidak akan ada NGO yang mau berterus terang mengenai masalah manajemen NGO dengan pemerintah. Memberi komentar pada majalah, surat kabar, website atau media lain adalah hal yang sangat keliru and bisa merugikan NGO itu sendiri. Jadi lebih baik bagi NGO untuk bekerja seperti GONGO atau menjadi GONGO. Itulah aturan main di Cina.

Kesimpulan

Melihat bencana alam di Cina adalah melihat peran pemerintah itu sendiri. NGO di Cina tidaklah sama dengan NGO di negara lain. Istilah Government Organized NGO adalah istilah yang cocok. Dan semuanya NGO asing harus menyesuaikan diri dengan istilah dan sistem NGO ini. Pemerintah Cina sendiri memang mengambil kebijakan sesuai dengan karakter negaranya. Dengan tetap mengatakan bahwa Cina menganut paham sosialis, maka mereka mempunyai alasan untuk berhati-hati pada setiap penetrasi asing, meskipun itu dengan alasan kemanusiaan. Cina juga mempunyai trauma sejarah sebagai bangsa besar yang pernah dipermalukan oleh bangsa barat. Maka dengan melihat NGO sebagai alasan bangsa barat untuk masuk ke Cina dan menanamkan nilai-nilai baru yang berbeda dengan pemerintah, maka aturan yang sangat ketat diberlakukan. Pemerintah Cina selalu mengambil peran utama dalam penanganan bencana alam di Cina, setiap kali NGO terlihat lebih berperan, maka pemerintah akan mempunyai cara untuk menurunkan peran itu sendiri. Dalam hal ini dengan beralasan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Cina, maka aturan-aturan normal dari NGO yang berlaku di seluruh dunia tidak berlaku di Cina. Meskipun pada tahun 2011 ini sudah mulai terlihat kelonggaran yang diberikan pemerintah Cina kepada NGO asing, tetapi dengan melihat catatan kesulitan NGO pada tahun 2010, kita akan sulit memprediksikan kemajuan yang pesat dari NGO di Cina pada masa yang akan datang. NGO di Cina akan terus bekerja sesuai dengan keterbatasannya, dimana yang menentukan keterbatasan itu adalah pemerintah Cina yang berkuasa.

Daftar Pustaka

- AFP. (2010). *China natural disaster toll rises to 4,342 dead or missing*,
<http://timesofindia.indiatimes.com/world/china/China-natural-disaster-toll-rises-to-4342-dead-or-missing/articleshow/6740817.cms>. diakses tanggal 17 Desember 2010.
- Asian Disaster Reduction Center (2010). *Disaster Emergency Management in China*.
http://www.adrc.asia/publications/TDRM2005/TDRM_Good_Practices/PDF/PDF-2005e/Chapter3_3.3.3-2.pdf. diakses tanggal 17 Desember 2010.
- CANGO, (2011), *The China Association for NGO Cooperation*, <http://english.cango.org/>,
diakses 20 Januari 2011.
- CEA (2010). *China Earthquake Administration*. <http://www.cea.gov.cn/manage/html> diakses
tanggal 15 Desember 2010.
- CENWOR, (2001) *Sri Lanka Shadow Report*,
http://www.womenandmedia.net/documents/Sri_Lanka_Shadow_Report.pdf, di akses 27
November 2010.
- China Development Brief, (2010). *Directory of International NGOs (DINGO)*,
<http://www.chinadevelopmentbrief.com/dingo/>, diakses 10 Januari 2011.
- Chinagate (2008). *Quake-hit Sichuan to Invest 3 Tln Yuan by 2010*,
http://en.chinagate.cn/features/earthquake/2008-11/21/content_16807370.htm, diakses 15
Desember 2010.
- Darmawan, B. (ed) (2006). *Cermin Dari China, Geliat Sang Naga di Era Globalisasi*. Jakarta :
Penerbit Buku Kompas.
- Davis, M. (2010) *China's New Nonprofit Regulations: Season of Instability*,
<http://www.asiacatalyst.org/blog/2010/06/chinas-new-nonprofit-regulations-season-of-instability.html>, diakses 30 Desember 2010.
- Expo (2010). *Expo 2010 Shanghai China*, <http://en.expo2010.cn/pavilions/index.htm>, diakses 30
Desember 2010.
- Floods in China. (2010). *Heavy Rain and Floods in China*,
<http://factsanddetails.com/china.php?itemid=395&catid=10&subcatid=65>. diakses
tanggal 10 Desember 2010.

- Gochengdoo, (2010). *How to donate to China's Sichuan-Qinghai earthquake relief efforts*, http://www.gochengdoo.com/en/blog/item/1477/how_to_donate_to_chinas_sichuanqinghai_earthquake_relief_efforts, diakses 16 Desember 2010.
- Hague, R. and Harrop, M. (Eds), (2007) *Comparative Politics and Government* (New York: Palgrave MacMillan).
- Han, F (2010). *Disaster Management in China*. <http://www.rsis-ntsasia.org/activities/conventions/2009-singapore/Han%20Feng.pdf>. Diakses 19 Desember 2010.
- Hoyer, B. (2008) *Lessons from the Sichuan Earthquake*, <http://www.odihpn.org/report.asp?id=3008> diakses 15 Desember 2010.
- Kaufman, J. *The Role of NGOs in China's AIDS Crisis*, <http://hausercenter.org/chinanpo/2009/06/the-role-of-ngos-in-china's-aids-crisis/>, diakses 10 Juni 2010.
- National Bureau of Statistic of China, (1998). *Statistical Communique of The People's Republic of China on The 1998 National Economic And Social Development*, <http://www.stats.gov.cn/was40/reldetail.jsp?docid=402459937>, diakses 12 Desember 2010.
- NDRC. (2010). *National Disaster Reduction Center*, <http://www.jianzai.gov.cn/>. diakses tanggal 17 Desember 2010.
- Oxfam Hongkong, (2010) *Qinghai Earthquake*, <http://www.oxfam.org.hk/en/qinghai.aspx>, diakses 22 Januari 2011.
- Peng, G. (2004). *China's National Defense*. Beijing: China Intercontinental Press.
- Roy, D. (1998). *China's Foreign Relations*. Hampshire: MacMillan Press.
- Thompson, D.(2008) *International Disaster Relief and Humanitarian Assistance: A Future Role for the PLA?* http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4941&tx_ttnews%5BbackPid%5D=168&no_cache=1, diakses 15 Desember 2010.
- Wibowo, I. (2001). *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina*. Jakarta: Gramedia.
- Wu, F.(2003) "Environmental GONGO Autonomy: Unintended Consequences of State Strategies in China" *The Good Society* - Volume 12, Number 1.

- Xinhua (2010a), *Lottery raises over 7 billion yuan for China's quake relief* ,
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-12/06/c_13637590.htm , diakses
 tanggal 20 Desember 2010.
- Xinhua (2010b). *Official: China's disaster relief effort not related to per capita GDP*.
http://english.peopledaily.com.cn/200601/19/eng20060119_236617.html diakses tanggal
 20 Desember 2010.
- Yin, Z, (2004). *The Political System of China*. Beijing: China Intercontinental Press.
- Yu, F. (2010). *Where are the NGOs in China's Natural Disasters?*,
http://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/ngo_talkview.php?id=1245., diakses 12
 Desember 2010.
- Zhou, Y. (2004). *China's Diplomacy*. Beijing : China Intercontinental Press.